

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberagaman etnis, tradisi, dan pengaruh globalisasi di Indonesia melahirkan berbagai persoalan budaya. Persoalan budaya merujuk kepada semua kejadian yang muncul dan berkembang dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat berupa tradisi lama yang terus bertahan atau kebiasaan baru yang muncul karena pengaruh dari luar, atau bahkan perpaduan antara keduanya dan salah satu persoalan budaya yang terjadi di Indonesia adalah marginalisasi.

Marginalisasi adalah usaha membatasi peran terhadap kelompok tertentu (KBBI VI Daring, 2016). Marginalisasi menurut ahli didefinisikan sebagai tindakan mengasingkan, meminggirkan, atau melemahkan kuasa suatu kelompok minoritas atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara dan kelompok dominan (Wahyudi, 2015). Marginalisasi adalah proses pemiskinan karena pihak yang termarginalisasi tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Hal ini sering kali terjadi dalam konteks gender, di mana perempuan dianggap hanya sebagai pendukung, sehingga hak-hak mereka diabaikan (Fakih, 2008).

Persoalan marginalisasi secara faktual juga terjadi di Indonesia seperti marginalisasi terhadap masyarakat Suku Laut yang terjadi di Riau. Suku Laut dikenal sebagai salah satu penduduk asli, menurut terminologi masyarakat setempat, orang Laut dikenal juga dengan sebutan Suku Laut atau Suku Nelayan. Persebaran orang Laut di Indragiri Hilir terkonsentrasi di pedesaan pantai dan kuala-kuala sungai, mereka hidup berdampingan bersama-sama warga penduduk

lainnya dengan latar belakang etnis dan asal daerah yang beragam. Orang Laut dikenal sebagai pelopor pendiri kampung karena mereka merupakan kelompok pertama yang membangun perkampungan menjadi desa. Warga penduduk asli lainnya selain orang Laut adalah orang Melayu dan kelompok pendatang terdiri dari orang Bugis, Banjar, Minangkabau, Cina, Batak, dan lainnya (Muammar, 2011).

Bentuk marginalisasi yang dialami oleh Suku Laut terdiri dari berbagai macam bentuk, yang paling mendasar dan dapat mengancam kelangsungan hidup mereka adalah kehidupan yang masih tradisional. Suku Laut masih mengandalkan alat tangkap dan perahu tradisional yang membuat mereka kalah bersaing secara signifikan dengan nelayan modern dan kapal besar. Selain itu, karena rendahnya tingkat pendidikan formal, mayoritas Suku Laut tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengakses pekerjaan di sektor darat atau industri, sehingga membatasi pilihan ekonomi mereka. Marginalisasi juga terjadi melalui perampasan atau penyempitan ruang hidup tradisional mereka, seperti proyek-proyek strategis nasional (PSN), pembangunan kawasan industri, dan pariwisata menyebabkan alih fungsi laut yang selama ini menjadi wilayah penangkapan ikan dan tempat bermukim Suku Laut (Muammar, 2011).

Marginalisasi Suku Laut juga terjadi pada bidang sosial budaya seperti sering kali mendapatkan stigma buruk, perlakuan diskriminasi, dan peleburan identitas. Suku Laut sering dikategorikan sebagai masyarakat suku terasing dan dilekatkan stigma negatif seperti dianggap tidak berpendidikan karena pola hidup nomaden mereka dan dianggap tidak beragama karena masih menganut kepercayaan animisme. Anak-anak Suku Laut yang mencoba bersekolah di darat sering kali menjadi korban perundungan dari teman sebaya, dan menjadi salah satu

faktor utama tingginya angka putus sekolah pada kelompok ini. Upaya untuk menyeragamkan pola hidup Suku Laut menjadi menetap dan mengikuti budaya dominan dianggap sebagai pelanggaran hak budaya, yang berpotensi menghilangkan tradisi dan identitas unik mereka (Muammar, 2011).

Secara faktual lainnya, marginalisasi di Papua merupakan persoalan yang kompleks dan berlapis yang kompleks dan berlapis, berakar pada sejarah panjang ketidaksetaraan dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP). Marginalisasi ini tidak hanya terbatas pada satu aspek, melainkan menyebar ke berbagai dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Marginalisasi dalam dimensi ekonomi adalah bentuk paling nyata. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam (emas, tembaga, dan gas), manfaat ekonomi dari eksploitasi ini sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat adat. Usaha-usaha besar umumnya dikuasai oleh pendatang atau perusahaan yang berasal dari luar Papua, sementara Orang Asli Papua (OAP) sering kali terpinggirkan dari lapangan pekerjaan formal. Di pasar tradisional "mama-mama Papua" (sebutan untuk para pedagang perempuan asli Papua) sering kali harus berjualan di pinggir jalan dengan alas seadanya, sementara kios-kios permanen didominasi oleh pendatang. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat tajam antara Orang Asli Papua dan para pendatang (I Nyoman Sudira, 2020).

Marginalisasi dalam dimensi sosial politik, Orang Asli Papua (OAP) sering merasa kurang terwakili dalam struktur pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional. Kekuasaan politik dan pengambilan keputusan sering kali didominasi oleh orang yang berasal di luar Papua, hal ini dapat menyebabkan kebijakan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan atau nilai-nilai lokal. Secara sosial,

interaksi antara Orang Asli Papua (OAP) dan pendatang terkadang memunculkan stereotip negatif dan diskriminasi (I Nyoman Sudira, 2020).

Marginalisasi dalam dimensi budaya, kekayaan budaya, bahasa, dan kearifan lokal Orang Asli Papua (OAP) terancam oleh homogenisasi budaya. Masuknya budaya luar ditambah dengan sistem pendidikan dan modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai adat, dapat mengikis identitas budaya mereka. Beberapa kajian bahkan menyebutnya sebagai "pembunuhan budaya" (*cultural genocide*) secara perlahan, di mana ikatan kekerabatan dan sistem kepercayaan tradisional semakin melemah (I Nyoman Sudira, 2020).

Secara faktual masih banyak marginalisasi yang terjadi di Indonesia, seperti marginalisasi kepada penyandang disabilitas, marginalisasi perempuan dan minoritas gender, serta marginalisasi terhadap pekerja informal (pedagang kaki lima). Selain persoalan marginalisasi yang terjadi secara faktual di Indonesia, persoalan marginalisasi juga terdapat dalam karya sastra berupa novel dengan judul *Perempuan di Ujung Tembawang* karya Paul Tao Widodo. Novel ini menggambarkan kehidupan Suku Anak Dalam yang termarginalisasikan karena adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, banyak faktor dari luar yang mengharuskan Suku Anak Dalam menjadi korban marginalisasi demi mempertahankan kehidupan dan kebudayaan mereka di dalam hutan.

Selain marginalisasi juga terdapat persoalan resistensi yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam pada novel *Perempuan di Ujung Tembawang* karya Paul Tao Widodo. Resistensi adalah kemampuan untuk menahan atau melawan, baik dalam konteks fisik ataupun psikologis (KBBI VI Daring, 2016). Resistensi menurut ahli

didefinisikan sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok bawahan (*subordinate groups*) yang ditujukan untuk mengurangi, menolak, atau menentang klaim (misalnya sewa, pajak, atau kekuasaan) yang dibuat oleh kaum atas (kelompok dominan atau penguasa) (Scott, 2000).

Persoalan resistensi secara faktual juga terjadi di Indonesia, yaitu perlawanan Suku Laut di Riau. Masyarakat Suku Laut telah melakukan berbagai resistensi untuk melindungi dan mempertahankan budaya serta ekosistem mereka, beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Suku Laut seperti pemberdayaan komunitas adat terpencil, program ini bertujuan untuk memodernisasi wilayah pinggiran dengan cara merumahkan Suku Laut agar mereka menjadi bagian dari masyarakat arus utama. Selain itu tokoh agama dan tokoh adat berperan dalam pembinaan dan konsultasi untuk membantu pemberdayaan masyarakat Suku Laut. Masyarakat Suku Laut berjuang untuk mempertahankan ruang hidup yang semakin terdesak akibat pembangunan, dan mereka berjuang untuk mengembangkan ekosistem laut yang mereka miliki untuk menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa bentuk perlawanan (resistensi) ini menunjukkan komitmen Suku Laut untuk melindungi dan mempertahankan budaya serta ekosistem mereka di tengah tantangan modernisasi dan perubahan lingkungan (Sahputra, 2023).

Secara faktual lainnya, resistensi di Indonesia juga dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP), perlawanan yang dilakukan cukup kompleks dan telah berlangsung sejak integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Perlawanan yang dilakukan dikategorikan pada perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok separatis dan perlawanan anti kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Bentuk perlawanan bersenjata melalui gerakan organisasi Papua

merdeka atau yang dikenal dengan OPM berdiri pada tahun 1965, OPM menolak integrasi Papua ke Indonesia dan menuntut kemerdekaan. Sementara perlawanan anti kekerasan, masyarakat sipil lebih berfokus pada kritik terhadap kebijakan dan sejarah integrasi Papua serta upaya mencari dukungan Internasional (Marthinus Ngabalin, 2024).

Perlawanan di Papua tidak terbatas pada kasus-kasus yang dijelaskan di atas, tetapi juga melibatkan perlawanan dari masyarakat adat Papua Barat karena pengabaian hak-hak masyarakat setempat. Proses pembangunan yang eksploitatif sering kali meminggirkan masyarakat sebagai elemen yang tidak penting dalam pengelolaan sumber daya, sehingga tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya sepenuhnya dikendalikan oleh aktor-aktor tertentu. Bagi masyarakat Papua Barat, tanah adat dan hutan yang dikelola telah lama menjadi milik bersama, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan inklusif (Marthinus Ngabalin, 2024).

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Papua Barat, seperti pemalangan tanah mencakup tuntutan kompensasi atas tanah adat yang digunakan untuk proyek infrastruktur, termasuk pembangunan Jalan Raya Trans-Papua Sorong-Manokwari. Mereka juga melakukan palang tanah di lokasi proyek dengan mekanisme hukum adat untuk menekan pihak-pihak terkait agar melakukan musyawarah. Masyarakat adat Papua Barat juga menyampaikan pengaduan dan tuntutan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), meskipun tidak mendapat tanggapan. Dalam proses ini, mereka memanfaatkan struktur kepemimpinan tradisional, seperti kepala suku untuk memperjuangkan hak atas tanah adat dan mewakili kepentingan masyarakat adat.

Dengan demikian, langkah-langkah ini merupakan strategi perlawanan sistematis untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah adat (Marthinus Ngabalin, 2024).

Selain persoalan resistensi yang terjadi secara faktual di Indonesia, persoalan resistensi juga terdapat dalam karya sastra berupa novel dengan judul *Perempuan di Ujung Tembawang* karya Paul Tao Widodo. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam yaitu mereka berjuang menyuarkan hak dan kondisi mereka untuk melawan pihak yang menyingkirkan mereka dari hutan, agar tetap mempertahankan kebiasaan melangun (sebutan bagi tradisi pengembaraan orang rimba).

Kelompok suku yang terpinggirkan seperti yang terjadi secara faktual di Indonesia maupun yang digambarkan oleh novel *Perempuan di Ujung Tembawang*, masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Dharmasraya. Suku Anak Dalam adalah masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada hutan, namun perluasan perkebunan dan aktivitas deforestasi membuat mereka kehilangan lahan yang merupakan sumber makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Perubahan ini memaksa mereka untuk meninggalkan gaya hidup nomaden (melangun) dan berhadapan dengan sistem ekonomi modern yang tidak mereka kuasai, sehingga mereka terjebak dalam kemiskinan. Hal ini membuat Suku Anak Dalam kehilangan sumber daya alam dan tanpa keterampilan yang relevan serta minimnya pendidikan. Posisi mereka yang rentan ini menjadikan mereka sasaran untuk dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Secara umum, penelitian ini perlu dilakukan karena persoalan marginalisasi dan resistensi dalam novel *Perempuan di Ujung Tembawang* karena kesenjangan isu Suku Anak Dalam yang menjadi sorotan dan kesenjangan isu tersebut belum pernah ada pada tulisan atau penelitian sebelumnya. Alasan secara spesifik karena Indonesia menganut sistem demokrasi dengan dasar negara Pancasila, seharusnya di Indonesia tidak terjadi marginalisasi dan tidak ada kelompok suku, etnis, atau masyarakat yang dimarginalkan, sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sejauh pengamatan penulis novel ini belum pernah diteliti, berdasarkan hasil pencarian pada database, kata kunci, jurnal, tahun, dan repositori belum ditemukan sama sekali penelitian pada novel *Perempuan di Ujung Tembawang* terkhusus dari perspektif Kajian Budaya juga belum pernah ada yang meneliti. Isu mengenai kehidupan Suku Anak Dalam yang merupakan salah satu kelompok suku terpinggirkan di Indonesia, melalui karya sastra pembaca dapat menyoroti persoalan budaya yang dihadapi oleh kelompok Suku Anak Dalam tersebut. Persoalan marginalisasi membuat Suku Anak Dalam dipaksa beradaptasi dengan modernitas dan kehilangan hutan sebagai tempat tinggal mereka.

Tidak hanya menyoroti persoalan marginalisasi terhadap Suku Anak Dalam tetapi juga menyoroti perlawanan mereka dalam menghadapi perubahan dan mempertahankan hak-hak mereka. Penelitian mengenai persoalan marginalisasi dan resistensi dalam novel *Perempuan di Ujung Tembawang* jika dianalisis berdasarkan perspektif Kajian Budaya akan menghasilkan kontra hegemoni karena marginalisasi merupakan dampak dari hegemoni dan Suku Anak Dalam melakukan perlawanan atas relasi kuasa yang dilakukan oleh pekerja perkebunan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah.